



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 97/KEP/HK/2025

TENTANG

PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa merupakan salah satu titik rawan terjadinya korupsi sehingga perlu dilakukan Upaya pencegahan dengan memprioritaskan pengelolaan sampai dengan pengendalian terhadap paket-paket pengadaan barang/jasa strategis;
 - b. bahwa kriteria paket pengadaan barang/jasa strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Paket pekerjaan berisiko tinggi dan kompleks, Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.3.5/37/BPB/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KEDUA : Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Paket Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Maret 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 97 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 29 Maret 2025

TENTANG PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA SATKER/ SKPD	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD)	JENIS/METODE PENGADAAN	PAGU (RP)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Pengelolaan Pendidikan-Pengelolaan Pendidikan SMA/Pembangunan Asrama Sekolah-Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) <ul style="list-style-type: none"> a. SMA Negeri 1 Loli b. SMA Negeri 1 Ngadu Ngala c. SMA Negeri 1 Restorasi Umbu Ratu Nggay d. SMA Negeri 2 Kodi e. SMA Negeri 2 Lembor f. SMA Negeri 2 Riung Barat g. SMA Negeri 2 Rote Barat Daya h. SMA Negeri 2 Sabu Barat i. SMA Negeri 2 Takari j. SMA Negeri 3 Kalabahi 	1. Kab. Sumba Barat 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Sumba Tengah 4. Kab. Sumba Barat Daya 5. Kab. Manggarai Barat 6. Kab. Ngada 7. Kab. Rote Ndao 8. Kab. Sabu Raijua 9. Kab. Kupang 10. Kab. Alor	DAU-SG	Konstruksi	12.540.000.000

NO	NAMA SATKER/ SKPD	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/ APBD)	JENIS/ METODE PENGADAAN	PAGU (RP)
			k. SMA Negeri 4 Takari l. SMA Negeri 5 Lamba Leda m. SMA Negeri Ndondo n. SMA Negeri Nianam o. SMA Negeri Noebeba p. SMA Negeri Pemana q. SMA Negeri 3 Elar r. SMA Negeri Bikomi Utara (Persiapan) beserta Perabotnya	11. Kab. Kupang 12. Kab. Manggarai Timur 13. Kab. Ende 14. Kab. TTS 15. Kab. TTS 16. Kab. Sikka 17. Kab. Manggarai Timur 18. Kab TTU			
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan SMK/Pembangunan Asrama Sekolah - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa : a. SMK Negeri 1 Amfoang Utara b. SMK Negeri 1 Boleng c. SMK Negeri 1 Reok Barat d. SMK Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Tengah e. SMK Negeri 2 Amfoang Selatan f. SMK Negeri 3 Elar g. SMK Negeri 6 Karera h. SMK Negeri Restorasi Oelbanu i. SMK Negeri Restorasi Pulau Komodo	1. Kab. Kupang 2. Kab. Flotim 3. Kab. Manggarai 4. Kab. Sumba Tengah 5. Kab. Kupang 6. Kab. Manggarai Timur 7. Kab. Sumba Timur 8. Kab. Kupang 9. Kab. Manggarai Barat	DAU-SG	Konstruksi	13.600.000.000

NO	NAMA SATKER/ SKPD	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/ APBD)	JENIS/ METODE PENGADAAN	PAGU (RP)
			j. SMK Negeri Restorasi Timung Wae Rii k. SMK Negeri 1 Labuan Bajo l. SMK Negeri 1 Loli m. SMK Negeri 1 Wanukaka n. SMK Negeri 3 Pahunga Lodu o. SMK Negeri 6 Kupang	10. Kab. Manggarai 11. Kab. Manggarai Barat 12. Kab. Sumba Barat 13. Kab. Sumba Barat 14. Kab. Sumba Timur 15. Kota Kupang			
3	RSKD Jiwa Naimata Kupang	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Gedung Unit Perawatan Intensiv Psikiatri Laboratorium Kesehatan	Provinsi	DAU-SG	Konstruksi	5.612.100.000

NO	NAMA SATKER/ SKPD	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/ APBD)	JENIS/ METODE PENGADAAN	PAGU (RP)
4	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitasi Pelayanan, Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Belanja Obat-Obatan-Obat (Fast Moving-Kemoterapi)	Provinsi	DAU	Barang	6.049.981.824
5	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitasi Pelayanan, Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Alat medis habis pakai, Bahan Medis Habis pakai,BHP Reagensia, Biaya pengganti pengolahan Darah)	Provinsi	DAU	Barang	9.229.524.987
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penyelenggaraan Jalan - Penyelenggaraan Jalan Provinsi /Rekonstruksi Jalan	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Yos Sudarso	Tenau	DAU	Konstruksi	4.000.000.000

NO	NAMA SATKER/ SKPD	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/ APBD)	JENIS/ METODE PENGADAAN	PAGU (RP)
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penyelenggaraan Jalan - Penyelenggaraan Jalan Provinsi /Pengantian Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Ponu di Kab. TTU	TTU	DAU	Konstruksi	4.136.973.000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan gedung UPTD PPA Provinsi NTT	Provinsi	DAU	Konstruksi	7.976.709.466
9	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah/ Pengadaan Bangunan Kantor dan Bangunan lainnya	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Provinsi	DAU	Konstruksi	13.770.679.000

NO	NAMA SATKER/ SKPD	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/ APBD)	JENIS/ METODE PENGADAAN	PAGU (RP)
10	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Gedung Baru di UPT - Gedung Kantor UPTD BAPENDA di UPT. Ngada	Ngada	DAU	Konstruksi	3.000.000.000
JUMLAH							79.915.968.277

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

